

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini akan mengupas tentang resistensi masyarakat Yunani terhadap penerapan SAPs dalam mengatasi krisis ekonomi. Krisis yang melanda Yunani telah memaksa pemerintah Yunani menerapkan SAPs untuk mencegah *contagion* di kawasan ataupun global. Sejak pemerintah Yunani menreparkan SAPs di negaranya, banyak dari kalangan masyarakat melakukan aksi penolakan, seperti demonstrasi dan mogok kerja atas keputusan yang diambil oleh pemerintah Yunani untuk mengatasi krisis ekonomi di negaranya.

Krisis ekonomi merupakan hal yang sering terjadi pada negara di dunia, baik negara yang memiliki pendapatan rendah maupun negara yang memiliki pendapatan yang tinggi. Krisis yang terjadi dapat menyebabkan kerugian yang besar dan dapat menyebar ke banyak negara kawasan ataupun global. Krisis keuangan ditandai dengan menurunnya likuiditas keuangan negara, sehingga berdampak pada kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun panjang. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk menangani krisis yang terjadi di negara-negara yaitu dengan menyediakan likuiditas keuangan yang cukup untuk negara yang terkena krisis. Penyediaan dana likuiditas untuk menangani krisis yang terjadi agar tidak tersebar ke negara lain, merupakan tugas IMF sebagai lembaga keuangan internasional. Dana likuiditas yang

disediakan IMF akan semakin besar jika dampak dari krisis semakin besar dan sudah menyebar ke negara-negara.¹

Krisis akan lebih mudah menyebar, jika krisis tersebut melanda kawasan yang terintegrasi seperti Uni Eropa. Uni Eropa sebagai institusi regionalisme yang mewadahi negara-negara yang berada di wilayah geografis benua Eropa. Jika dibandingkan dengan institusi regional lainnya, Uni Eropa menjadi institusi yang paling terintegrasi dengan baik terhadap negara anggotanya. Uni Eropa sebagai institusi mencoba mencapai integrasi dari segala bidang terutama ekonomi yang menjadi hal penting bagi kehidupan masyarakat. Sehingga jika terjadi masalah dalam perekonomian negara anggota, Uni Eropa berperan serta dalam pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satu bentuk permasalahan ekonomi yaitu krisis ekonomi, hal tersebut dapat menghancurkan integrasi kawasan. Krisis ekonomi telah melanda Uni Eropa pada tahun 2008. Krisis ini berawal dari kredit macet Amerika Serikat, lalu merambat ke kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia Pasifik. Hal ini terjadi karena permasalahan pada investasi langsung, investasi tidak langsung, dan perdagangan, akibatnya setiap negara memiliki risiko terkena dampak krisis.

Krisis di Eropa pertama kali melanda Yunani. Krisis di Yunani ini berawal dari defisit anggaran pemerintah yang semakin besar. Krisis hutang di

¹ Irfā Ampri, “Arsitektur Keuangan Internasional: Peningkatan Kapasitas Pendanaan IMF Dalam Mengatasi Krisis Keuangan Global”, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Hal. 1.

Yunani berawal dari akumulasi defisit anggaran yang setiap tahunnya rata-rata mencapai 6% dari GDP selama 30 tahun. Yunani tidak berhati-hati dalam kebijakannya, sehingga defisit negaranya mencapai dua kali dari yang ditetapkan Uni Eropa (UE) dimana maksimum defisit 3%.² Krisis di Yunani terjadi diantaranya karena menumpuknya utang di negara tersebut yang mencapai >111 Billion Euro atau sekitar >100% dari GDPnya. Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir defisit anggaran belanja Yunani relatif cukup tinggi rata-rata sekitar >5% dalam 7 tahun terakhir (batas normal defisit anggaran menurut standar internasional uni eropa adalah 3%). Pada akhir bulan April 2010, *Eurostat* memberikan informasi kenaikan defisit Yunani menjadi 10,5% dari GDPnya. Jumlah defisit neraca pembayaran Yunani tersebut merupakan yang terburuk di dunia disusul oleh Portugal dan lain-lain.³

Krisis yang melanda Yunani telah menyebar ke negara anggota Uni Eropa lainnya, sehingga Yunani maupun Uni Eropa mendapatkan perhatian internasional. Masalah Yunani ini membuat Uni Eropa dan *International Monetary Fund* (IMF) berkerjasama untuk menyelesaikan krisis. IMF merupakan badan khusus dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan atas dasar perjanjian internasional pada tahun 1945 untuk membantu perekonomian dunia. IMF menyediakan dana bantuan untuk pembiayaan

² Lela Nurlaela Wati. "Krisis Yunani serta Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia". *Jurnal STIE Muhammadiyah Jakarta*, 2010. Hal 2.

³ Dapen Bank Mandiri, "Krisis Finansial Yunani".

<http://www.dapenbankmandiri.co.id/news/2010/06/Krisis-Financial-Yunani> (diakses 3 Mei 2015)

sementara dalam menyelesaikan masalah neraca pembayaran, juga mendorong negara-negara agar melaksanakan kebijakan ekonomi yang baik.⁴ Keanggotaan Yunani Uni pada Eropa mengharuskan negara-negara Eropa lainnya ikut serta dalam memutuskan kebijakan karena keterikatan Yunani oleh perjanjian keanggotaan.

Pada bulan Mei 2010, para pemimpin Uni Eropa mengadakan pertemuan di Brussels dalam upaya menangani krisis Yunani. Topik yang diangkat di Brussels ini membahas tentang *loan guarantee* atau tanggungan hutang untuk pinjaman senilai 80 milyar Euro dari Uni Eropa. Uni Eropa berharap *bailout* atau bantuan ini mampu menangani krisis dengan menurunnya defisit Yunani dibawah 3%. IMF menyetujui pinjaman 30 milyar Euro, sehingga total dana yang didapat untuk *bailout* Yunani mencapai 110 milyar Euro. Pinjaman yang diberikan memiliki waktu jatuh tempo 3 tahun.⁵ Bantuan tersebut belum mampu menstabilkan ekonomi Yunani sehingga pada tahun 2012 muncul tawaran lain dari Dana Moneter Internasional (IMF) berupa bantuan *bailout* kedua sebesar 130 Milyar untuk mendukung program Yunani selama empat tahun ke depan. Tetapi setelah menerima dua kali bantuan, ekonomi Yunani

⁴ Jeremy Clift, *International Monetary Fund* (Washington D.C, 2001) hal.2.

⁵ Rizky Musafi, "Faktor-faktor Penghambat Uni Eropa Dalam Usaha Perbaikan Ekonomi dan Politik di Yunani", thesis FISIP UPN Yogyakarta (2011).

masih belum stabil, sehingga pada 13 Juli 2015 Uni Eropa dan IMF sepakat untuk pemberian bailout ketiga senilai 86 milyar Euro⁶

Bantuan dana tersebut mengharuskan Yunani menerapkan kebijakan ekonomi yang baik yang disebut dengan *Structural Adjustment Programs* (SAPs). SAPs yang dijadikan syarat pinjaman atau resep pemulihan ekonomi oleh IMF dan Uni Eropa kepada Yunani. SAPs diberikan kepada Yunani agar bantuan dana yang telah diterima oleh Yunani digunakan sesuai dengan tujuan, sehingga mampu mengurangi defisit negara. Program-program yang terdapat di SAPs yaitu promosi perdagangan dunia, stabilitas nilai tukar, mencegah devaluasi mata uang kompetitif, dan melakukan pengawasan secara tertib terhadap neraca pembayaran suatu negara.⁷ SAPs mulanya dirumuskan untuk mengatasi bencana ekonomi global pada tahun 1970-an seperti depresi ekonomi internasional, dan stagnasi ekonomi negara-negara Dunia Ketiga.⁸

Selain mengurangi defisit negara, SAPs juga bertujuan untuk mencegah contagion dari krisis Yunani serta melindungi perekonomian negara anggota Uni Eropa yang lain. IMF dan Uni Eropa memberikan bantuan juga sebagai penyelamat institusi-institusi perbankan dari negara-negara kreditur. Kemungkinan terbesar dampak buruk dari krisis di Yunani yaitu akan

⁶ Ministry of Finance, "Target Restrukturisasi Utang Yunani Tercapai" *economic watch* (2012). Hal. 1.

⁷ James B Greenberg , *A Political Ecology of Structural-Adjustment Policies: The Casa of the Dominican Republic* (1997), hal. 85-93.

⁸ Towson,

<http://wwwnew.towson.edu/polsci/ppp/sp97/imf/POLSAP1.HTM#Historical%20Backdrop%20of>
(diakses 3 Mei 2015)

terjadinya perambatan krisis keuangan di kawasan Eropa bahkan global. Penerapan dari SAPs ini akan dimonitori oleh Uni Eropa, *European Central Bank*, dan IMF. SAPs juga akan dievaluasi secara periodikal dan Yunani harus menerima rekomendasi struktural. SAPs telah diterapkan oleh pemerintah Yunani untuk menstabilkan ekonominya, tetapi penerapan tersebut justru menimbulkan resistensi dari masyarakat Yunani.

Dari tahun 2010 hingga 2015 terjadi rangkaian aksi pemberontakan masyarakat Yunani yang menolak penerapan SAPs. Pada tahun 2010, terjadi tiga demonstrasi di Athena, yaitu dari kelompok komunis, serikat pegawai pemerintah dan kelompok sosialis, yang secara terpisah turun ke jalan-jalan di ibukota Athena, kelompok-kelompok tersebut memprotes SAPs yang diadakan pemerintah.⁹ Aksi penolakan ini terjadi berturut-turut pada awal Mei 2010 bersamaan dengan keputusan pemerintah untuk menerima bantuan dan menerapkan SAPs, dan aksi penolakan tersebut kembali terjadi di bulan September 2010. Beberapa hari di bulan yaitu 4, 15, dan 28 Juni 2011 dan 5, 19 sampai 20 Oktober 2011, masyarakat kembali melakukan serangkaian aksi mogok kerja untuk memprotes pemerintah. Pada tahun 2012, terutama di bulan Februari kembali terjadi rangkaian demonstrasi dan mogok kerja yang

⁹ “1 Mei di Yunani, Lilitan Hutang dan Demonstrasi”, *DW*, 1 Mei 2010, hal.1

memprotes keputusan pemerintah untuk penerapan SAPs, yang merupakan resep dari UE dan IMF sebagai pemberi bailout.¹⁰

Jutaan kaum buruh berpartisipasi dalam mogok serentak di Yunani pada tanggal 6 sampai 18 November 2012, terjadi beberapa kali pemogokan yang dilakukan di sejumlah layanan publik dan pusat-pusat kekuasaan oleh GSEE dan ADEDY yaitu serikat buruh Yunani.¹¹ Pada bulan Juli, September, dan November 2013 kembali terjadi serangkaian aksi pemberontakan. Beberapa hari Di bulan Mei, November, dan Desember 2014 terjadi aksi penolakan SAPs yang kembali dilakukan oleh masyarakat. Tanggal 14 Juli 2015, masyarakat di Yunani melemparkan sejumlah bom molotov ke arah polisi, sehingga terjadi kerusuhan di depan gedung parlemen yang membahas penerapan SAPs demi mendapatkan dana talangan sebesar 86 miliar Euro dari Uni Eropa. Sebelumnya, ribuan masyarakat menduduki jalan di Athena dan menggelar aksi damai menentang SAPs, tetapi kembali berujung pada kerusuhan.¹²

¹⁰ Susana Vera, “*Demonstration in Greece and Spanyol*”, Madrid. 28 September 2012.

¹¹ KSBI, “Perjuangan Kaum Buruh Dunia Melawan Neoliberalisme”, <http://www.kasbi.or.id/perjuangan-kaum-buruh-dunia-melawan-neoliberalisme/>, 30 Oktober 2015.

¹² Reuster, “Demonstrasi Anti Bailout di Yunani Berujung Kerusuhan”, CNN Indonesia, 16 Juli, 2015, hal.1. <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150716023529-134-66655/demonstrasi-anti-bailout-di-yunani-berujung-kerusuhan/>

B. Rumusan Masalah

Mengapa terjadi resistensi masyarakat Yunani terhadap penerapan *Structural Adjustment Programs* oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi negara?

C. Kerangka Pemikiran

Neoliberalisme yang merupakan tahapan lanjut dari liberalisme, berkembang di barat sekitar abad 18 sampai abad 19. Liberalisme merupakan paham yang mempertahankan kebebasan individu untuk melawan intervensi komunitas. Liberalisme ekonomi dan *civic liberalism* akan berkembang menjadi neoliberalisme. Liberalisme sendiri memandang bahwa ekonomi pasar mempunyai kebebasan dalam berinteraksi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, tetapi pemerintah tetap menjamin terlaksananya interaksi ekonomi.¹³

Pada tahun 1930-an terjadi depresi besar (*The Great Depression*) yang melanda dunia. Ketika itu juga muncul seorang ekonomi Inggris yang menentang liberalisme yang bernama John Maynard Keynes. Keynes berpendapat bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi dalam perekonomian, dan membangun sebuah model baru. Ekonomi keynessian sering disebut juga *Welfare State* (Negara Kesejahteraan, yaitu kepemilikan

¹³ Siti Aminah Caniago, "Munculnya Neoliberalisme sebagai Bentuk Baru Liberalisme", *Jurnal STAIN Pekalongan*, (2009). Hal 2-5.

negara atas sebagian besar industri dan pemerintahan yang intervensionis) mampu mempengaruhi Presiden Roosevelt, sehingga muncul kebijakan yang dikenal dengan “*New Deal*” karena dianggap berhasil menyelamatkan rakyat Amerika. Sehingga, peran pemerintah atau negara pada saat itu makin menguat, dan memudarkan liberalisme.¹⁴

Namun, di akhir tahun 1970-an terjadi depresi ekonomi, sehingga mengembalikan sistem semula. Doktrin Keynesian dianggap sebagai penyebab tragedi ini. Kaum kapitalis meyakini bahwa pasar bebas lebih mampu memajukan perekonomian negara dibandingkan negara, dimana pasar bebas lebih mendatangkan keuntungan daripada kerugian. Negara kembali ke fungsi semula yaitu melakukan deregulasi, privatisasi, atau menyerahkan sebagian fungsi negara kepada swasta. Perkembangan inilah yang memunculkan neoliberal.¹⁵

Melalui *corporate globalization*, sistem ekonomi kembali ke sistem awal. Paham liberalisme dihidupkan kembali dengan sebuah “konsensus” yang dipaksakan, yaitu konsensus 1980-an dikenal juga dengan *The Washington Consensus*. Consensus ini berasal dari para pembela ekonomi pasar bebas, yaitu terdiri dari wakil perusahaan-perusahaan besar *Transnasional Corporations* (TNCs) atau *Multinational Corporations* (MNCs), *World Bank*, IMF serta

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

wakil negara kaya. Mereka menyebut kesepakatan tersebut sebagai reformasi ekonomi dengan diberlakukannya kembali pasar bebas di era global. Apa yang tertulis di *The Washington Consensus* tertuang juga di *Structural Adjustment Programs* (SAPs), dimana SAPs pada saat itu dijadikan resep untuk mengobati depresi ekonomi internasional hingga saat ini.¹⁶ SAPs sampai saat ini masih tetap sebagai resep untuk memulihkan ekonomi suatu negara.

1. Konsep *Structural Adjustment Programs*

Structural Adjustment Programs yang saya kutip dari buku Abouharb dan Cingranelli, *Structural Adjustments* adalah kebijakan yang diterapkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia (*Bretton Woods Institutions*) di negara-negara berkembang dalam rangka untuk memulihkan perekonomian negara yang mengalami masalah moneter, agar negara penerima pinjaman mampu mengembalikan dana pinjaman tepat waktu.¹⁷ Seperti halnya Yunani sebagai negara yang mengalami masalah moneter menerima SAPs dari Uni Eropa dan IMF.

Kebijakan ini adalah persyaratan untuk mendapatkan pinjaman baru dari IMF atau memperoleh suku bunga yang lebih rendah atas pinjaman yang ada. Persyaratan diterapkan untuk memastikan bahwa uang yang dipinjamkan akan digunakan sesuai dengan tujuan dari keseluruhan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ M. Rodwan Abouharb, David Cingranelli, "*Human Rights and Structural Adjustment*" (UK:Cambridge University Press). Hal 54.

pinjaman. Persyaratan ini berlaku di Yunani dengan tujuan untuk menurunkan defisit di bawah 3% serta menstabilkan ekonomi Yunani dan mencegah persebaran dari krisis.

Structural Adjustment Programs (SAPs) juga dibuat dengan tujuan mengurangi ketidakseimbangan fiskal negara peminjam. Bank dari negara peminjam seperti Yunani yang menerima besar pinjaman tergantung dari jenis kebutuhan. SAPs memungkinkan perekonomian negara-negara berkembang menjadi lebih berorientasi pasar. Hal ini kemudian memaksa mereka untuk lebih berkonsentrasi pada perdagangan dan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka.¹⁸ Program ini diantaranya yaitu perubahan internal (terutama privatisasi dan deregulasi) maupun perubahan eksternal, terutama pengurangan hambatan dalam perdagangan. Negara-negara yang gagal untuk menetapkan program-program ini dapat dikenakan disiplin fiskal parah.

Adapun definisi *structural adjustment programs* yang saya kutip dari buku *A Political Ecology of Structural-Adjustment Policies: The Case of The Dominican Republic, Culture & Agriculture*, Greenberg, James B., *Structural Adjustments* juga sering juga disebut sebagai *The Washington Consensus* dapat mencakup:¹⁹

¹⁸ James B Greenberg, *Op.Cit*

¹⁹ *Ibid.*

- a. *Austerity* yaitu memotong pengeluaran atau anggaran belanja pemerintah,
- b. Fokus ekonomi output terhadap ekspor langsung dan ekstraksi sumberdaya,
- c. Devaluasi mata uang,
- d. Liberalisasi perdagangan yaitu dengan melakukan penghapusan hambatan impor dan ekspor,
- e. Investasi yaitu dengan meningkatkan stabilitas investasi melalui pembukaan peluang investasi modal asing dan membuka saham pasar domestik,
- f. Menyeimbangkan anggaran atau pengeluaran dan tidak *overspending*,
- g. Menghapus kontrol harga maupun subsidi negara,
- h. Privatisasi yaitu pelepasan semua atau sebagian dari perusahaan milik negara,
- i. Meningkatkan hak-hak investor asing vis-a-vis hukum nasional, serta memfasilitasi investor dengan konstitusi negara,
- j. Memperbaiki tata pemerintahan dan memerangi korupsi

Yunani sebagai negara peminjam dana dari IMF dan UE telah mengimplementasikan program-program tersebut, diantaranya yaitu *austerity*, menghapus kontrol harga dan subsidi, mengontrol pengeluaran,

privatisasi, dan program lainnya, yang merupakan resep dari IMF dan UE. SAPs yang diterapkan Yunani lebih difokuskan pada program *Austerity*, kearena selama ini Yunani sangat boros dalam anggaran negaranya. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan ekonomi Yunani, sehingga Yunani mampu mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan tempo yang ditentukan.

2. Teori Deprivasi Relatif

Teori *Relative Deprivation* atau deprivasi relatif merupakan salah satu teori klasik yang membahas gerakan sosial dan politik. Teori deprivasi relatif dianggap klasik karena lebih banyak menjelaskan gejala kolektif dari masyarakat agraris tradisional. Disisi lain, teori *Relative Deprivation* ini juga banyak digunakan untuk menjelaskan gejala gersospol masyarakat petani, nelayan, dan masyarakat agraria lainnya. Seiring perkembangan jaman, kemudian teori ini banyak digunakan juga untuk menjelaskan gejala *crowd* di perkotaan seperti menjelaskan gerakan buruh, mahasiswa, dan masyarakat lainnya yang sedang mengalami kekecewaan terhadap kenyataan yang ada.²⁰

Teori Deprivasi Relatif Ted Robert Gurr menjelaskan bahwa gejala sosial muncul pada saat terjadinya kesenjangan antara nilai pengharapan (*value expectations*) dan nilai kemampuan (*value*

²⁰ Meyrza AshrieTristyana, “Definisi, Konsep, dan Teori Gerakan Sosial Politik”.
<http://www.scribd.com/doc/69071644/Definisi-Konsep-dan-Teori-Gerakan-Sosial-Politik#scribd>
(diakses 27 September 2015)

capabilities) dalam masyarakat.²¹ Teori ini menekankan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sehingga membawa perasaan “keterampasan”. Ted Gurr berpendapat bahwa kekerasan terjadi ketika masyarakat marah apabila terjadi perampasan. Masyarakat cenderung akan melakukan pemberontakan, jika mereka merasa sesuatu yang berharga bagi mereka dirampas. Perasaan dirampas inilah yang disebut dengan *relative deprivation*. Munculnya perasaan dirampas ini terjadi akibat tidak sesuainya keinginan dengan kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemampuan untuk mencapai keinginan tersebut ada, tetapi upaya untuk mencapainya dihambat atau digagalkan, kondisi seperti inilah yang menimbulkan rasa dirampas. Hal yang dirampas tergolong dalam nilai ataupun kebutuhan mendasar masyarakat, seperti nilai kesejahteraan, kekuasaan, dan interpersonal.²²

Dalam buku *Why Men Rebel* yang ditulis oleh Ted Robert Gurr, mengklarifikasikan Teori Deprivasi Relatif ke dalam tiga bagian utama, yakni²³:

a. Decremental Deprivation

Decremental Deprivation yaitu menunjukkan nilai yang diharapkan yang terdapat di masyarakat dalam keadaan stabil, sementara itu nilai

²¹ Tedd Robert Gurr. *Why Men Rebel*. Princeton: Princeton University Press, 1970.

²² Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elit*. Yogyakarta: Resist Book, 2005. Hal. 24

²³ Tedd Robert Gurr. *Op.Cit.*

kapabilitas justru mengalami penurunan, hal ini terjadi dalam keadaan yang bersamaan. Akibatnya terjadi kesenjangan yang disebabkan oleh nilai kapabilitas. Menurut konsep ini masyarakat akan mengalami perasaan kecewa dan frustrasi. Perasaan semacam inilah yang pada akhirnya akan menjadi alasan timbulnya rasa ingin melawan atau memberontak.

b. Aspiration Deprivation

Menunjukkan suatu kondisi dimana nilai yang diharapkan mengalami peningkatan, tetapi pada saat yang bersamaan juga nilai kapabilitas berada dalam keadaan statis tak berubah atau tetap. Kesenjangan yang disebabkan tersebut, dimana terjadi kenaikan harapan, tetapi kemampuan untuk mewujudkan harapan tersebut dalam keadaan tidak berubah, seperti halnya yang dinyatakan oleh Gurr menjadi penyebab munculnya perasaan kecewa dan frustrasi. Dalam kondisi inilah muncul tindakan melawan atau memberontak dapat meluap ke permukaan.

c. Progressive Deprivation

Menunjukkan kondisi dimana nilai yang diharapkan maupun nilai kapabilitas yang terdapat di dalam masyarakat mengalami kenaikan antara kedua nilai tersebut. Dalam beberapa waktu hal ini masih bisa ditoleransi, akan tetapi pada waktu tertentu dapat terjadi peristiwa dimana nilai yang diharapkan mengalami kenaikan, tetapi nilai kapabilitas terjadi

penurunan dan kadang berhenti proses kenaikannya. *Progressive Deprivation* juga merupakan kondisi nilai yang diharapkan naik secara berkelanjutan, sedangkan nilai kapabilitas proses kenaikannya berhenti dan kemudian bergerak menurun, hal ini akan menimbulkan kesenjangan yang pada akhirnya dapat melahirkan perasaan kecewa atau frustrasi. Kondisi seperti ini, sebagaimana dua konsep deprivasi yang telah disebutkan sebelumnya, juga dapat menimbulkan tindakan melawan atau memberontak.

Jika di dalam masyarakat terjadi suatu kesenjangan antara nilai yang diharapkan dengan nilai kapabilitas untuk menggapai harapan, maka masyarakat tersebut akan mengalami kekecewaan dan merasa terampas. Keadaan tersebutlah yang terjadi pada masyarakat Yunani, dimana nilai yang diharapkan masyarakat dengan nilai kapabilitas untuk menggapai harapan tersebut tidak seimbang atau kemampuan maupun upaya untuk menggapai harapan tersebut dibatasi bahkan dihilangkan oleh pemerintah untuk menerapkan SAPs, sehingga kondisi seperti inilah yang menimbulkan tindakan melawan ataupun memberontak. Masyarakat Yunani berharap SAPs yang diterapkan pemerintah mampu menyelesaikan masalah krisis tanpa menghilangkan nilai kesejahteraan, tetapi pada kenyataannya SAPs yang diterapkan oleh pemerintah Yunani belum mampu menyelesaikan masalah krisis, justru menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Semakin besar tingkat kesenjangan yang

terjadi di masyarakat, maka semakin besar juga munculnya tindakan melawan dan memberontak tersebut. Kesenjangan inilah yang menimbulkan timbulnya aksi - aksi massa.

D. Hipotesa

Terjadinya resistensi masyarakat Yunani terhadap penerapan SAPs oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi karena SAPs membuat kemampuan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan melalui kemudahan dan fasilitas dibatasi, bahkan dihilangkan oleh negara.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita tuju dan capai dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menginformasikan apa yang menjadi penyebab krisis Yunani.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya resistensi masyarakat terhadap *Structural Adjustment Programs* yang diterapkan di Yunani dalam mengatasi krisis.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi dalam jangkau waktu dari sebelum terjadinya krisis Yunani yaitu upaya Yunani masuk dalam *Eurozone* dan berakhir pada

kondisi perekonomian Yunani serta rangkaian aksi pemberontakan masyarakat di tahun 2015.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa masalah ini yaitu metode penelitian studi literatur, dengan menggunakan data-data sekunder dari buku, jurnal, karya ilmiah, surat kabar, majalah, maupun situs-situs internet. Yang kemudian data-data tersebut dianalisis sesuai dengan kebutuhan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasa, sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

BAB I : Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, *research question*, kerangka pemikiran yang digunakan, hipotesa, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini menjelaskan kondisi ekonomi Yunani Sebelum terjadinya krisis ekonomi, krisis ekonomi Yunani, dan penyebab-penyebab terjadinya krisis ekonomi Yunani

BAB III : Dalam bab ini akan menjelaskan pinjaman dana dari EU dan IMF, serta penerapan SAPs oleh pemerintah Yunani dalam upaya melepaskan diri dari krisis yang terjadi.

BAB IV : Dalam bab ini akan membahas resistensi masyarakat Yunani dari partai politik sayap kiri (SYIRAZ dan KKE), buruh (GSEE dan ADEDY), kelompok *Aganaktismenoi (Indignants)*, dan pekerja ERT, serta alasan menolak diterapkan SAPs oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi Yunani.

BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan dari skripsi.